

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkoba serta efektivitas mekanisme pengawasan internal dan kesadaran etika

1. Mekanisme pengawasan internal yang efektif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus dilaksanakan melalui sistem yang transparan, berjenjang, dan berorientasi pada penegakan disiplin serta profesionalisme. Fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memegang peran sentral dalam melakukan deteksi dini, pemeriksaan, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran anggota. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada integritas aparat pengawas, dukungan regulasi yang tegas, serta adanya kolaborasi antara pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah konflik kepentingan serta menjamin objektivitas dalam proses penegakan hukum.
2. Pemahaman dan kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika profesi dan moralitas harus menjadi bagian dari pembinaan karakter setiap anggota. Etika dan moral bukan hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi tolok ukur profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kesadaran moral yang kuat akan mendorong aparat untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk

pendidikan etika profesi, pembinaan rohani, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang konsisten untuk menumbuhkan integritas dan tanggung jawab moral anggota Polri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Institusi Polri, diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal dengan menerapkan mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga secara preventif melalui pemantauan perilaku, gaya hidup, dan pola interaksi anggota di lapangan. Diperlukan pula optimalisasi peran Divisi Propam dan Itwasum Polri agar lebih independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, Polri perlu menjalin sinergi dengan lembaga eksternal, seperti Kompolnas, BNN, dan lembaga masyarakat sipil, untuk memastikan pengawasan yang obyektif, adil, dan bebas dari intervensi.
2. Bagi Pimpinan dan Pembina Etika di Lingkungan Polri, perlu ditingkatkan kembali program pembinaan etika dan moral profesi yang tidak bersifat formalitas semata, tetapi diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan dinas dan pribadi anggota Polri. Materi pembinaan harus disesuaikan dengan tantangan modern, seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan keterlibatan dalam jaringan narkoba. Program seperti pelatihan integritas,

pembinaan rohani, dan dialog etika perlu dilakukan secara berkala untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota Polri memiliki landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi internal Polri terkait pengawasan dan penegakan kode etik profesi. Sanksi bagi anggota yang terlibat tindak pidana narkoba harus ditegakkan tanpa pandang bulu untuk menegaskan prinsip *equality before the law*. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat sistem rekrutmen dan promosi jabatan berbasis integritas, bukan hanya pada aspek kemampuan teknis, agar tercipta lingkungan kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme dan moralitas.
4. Bagi Anggota Polri Secara Individu, perlu adanya kesadaran diri yang tinggi untuk menjaga kehormatan pribadi dan institusi dengan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran etika profesi. Setiap anggota harus memahami bahwa etika dan moral merupakan pondasi utama dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pribadi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi pengawasan eksternal dan partisipasi publik dalam memantau perilaku aparat penegak hukum. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh pendidikan etika profesi dan pembinaan karakter terhadap penurunan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota

Polri. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret untuk perbaikan kebijakan internal Polri ke depan.



THE
Character Building
UNIVERSITY